

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah (PP). Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati atau Walikota, selain melaksanakan tugas tersebut Camat juga bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan.

Didalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yaitu pada pasal 15 ayat (2) disebutkan rambu – rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati atau Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang salah satunya yaitu aspek pengawasan. Pelaksanaan kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai dengan perundang – undangan. Untuk itu, pelaksanaan pengawasan terhadap pegawai perlu dilakukan dan merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, karena ruang lingkup pengawasan meliputi keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

Kecamatan di Indonesia masih banyak memberikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dimaksud dengan SOP yaitu suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator - indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja

dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dimana SOP ini mengarah ke dalam proses pelaksanaan administrasi dikantor instansi pemerintah. Undang – undang yang mengatur SOP yaitu Permen PAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Hal ini dapat di lihat dari kinerja pegawainya tidak berdasarkan undang – undang yang berlaku dan sesuai peraturan yang telah di buat. Termaksud di kecamatan Medan Denai, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik pegawai yang berada di kantor camat Medan Denai.

Dalam proses pembuatan kartu keluarga dan E-KTP pelayanan yang diberikan pegawai tidak sesuai yang di harapkan oleh masyarakat, pegawai yang kurang ramah atau tidak memberikan 5S (senyum, sapa, sopan ,satun, dan salam), kurangnya disiplin waktu dan efektif dan efesiensi dalam melaksanakan tugas serta minimnya sarana dan prasarana. Permasalahan di atas sangat menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam bentuk pelayanan belum baik dan tidak sesuai dengan Undang – undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Dengan permasalahan yang ada di kecamatan medan denai maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian peran camat dalam proses pengawasan yang berlangsung. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana usaha – usaha yang dilakukan, apakah sesuai dengan program yang telah dibuat atau belum.

Camat selaku pemimpin organisasi pemerintahan kecamatan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan organisasi. Seorang Camat harus mampu membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau pun kelurahan sebagaimana di atur oleh Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dan pelayanan yang baik di tingkat kecamatan maka dari itu pengawasan harus terus di lakukan agar setiap aparat kecamatan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Telah dijelaskan dalam Ketetapan Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian. Melalui Sosialisasi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/46/M.PAN/4/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah, ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam rangka peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik dan membina, maka diharapkan kinerja pegawai negeri sipil yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Tujuan pengawasan ialah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Fungsi pengawasan adalah agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diketahui secara dini.

Keberhasilan aparat kecamatan dalam melaksanakan tugas – tugasnya adalah merupakan keberhasilan camat dimana berperan sebagai pemimpin, maka dari itu dalam pelaksanaan perlu adanya disiplin kerja oleh aparat pemerintah kecamatan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Pengertian kinerja dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005), mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Dalam suatu pemerintahan, sumber daya manusia yang tak lain sebagai tenaga kerja adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.

Kinerja yang optimal bergantung kepada perilaku yang tercermin oleh para pegawai itu sendiri. Perilaku tersebut meliputi sikap dan disiplin pegawai pada pelaksanaan tugas yang dikerjakan. Penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Pemimpin yang menilai kinerja pegawai, yaitu atasan pegawai langsung, dan atasan tak langsung.

Pada dasarnya pengawasan camat terhadap kinerja pegawai yang melakukan proses pelayanan publik terhadap kegiatan administrasi yang modern. Oleh karena itu pengawasan camat tersebut juga tidak hanya melalui pengawasan yang berupa kinerja pegawai, akan tetapi juga pengawasan terhadap alat-alat pendukung dari proses kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik maka diharapkan kinerja pegawai yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin membahas bagaimana peran camat dalam pengawasan terhadap kinerja pegawai dengan judul :

“Peran Camat dalam Mengawasi Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah harus diperhatikan agar masalah dalam penelitian ini nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induk. Identifikasi masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

Dalam penelitian ini masalah yang harus diidentifikasi yaitu :

1. Peran Camat dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.
2. Hambatan dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan batasan – batasan masalah yang sengaja dibuat agar pembahasan yang akan dibuat tidak terlalu luas, oleh karena itu mengingat luasnya ruang lingkup pembahasan tersebut dan agar tidak menimbulkan ketidak jelasan serta kekeliruan dalam pembahasan penelitian ini, maka ada batas masalah yang menjadikan penelitian ini lebih efektif dan efesiensi.

Ada pun pembatasan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Peran camat dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.
2. Penelitian ini di batasi perihal pengawasan terhadap kualitas kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian.

Wina Sanjaya (2013 : 180) mengatakan masalah penelitian hakikatnya adalah merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi dalam lapangan, kesenjangan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Masalah adalah semua peristiwa yang terjadi dalam hidup sehari-hari, sedangkan permasalahan penelitian adalah pembatasan fokus perhatian ruang lingkupnya sampai menimbulkan pertanyaan dari dalam diri orang-orang yang mencari permasalahan. Perumusan masalah merupakan tolak ukur baiknya suatu pekerjaan penelitian dan merupakan pernyataan rinci yang lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas, maka adapun perumusan masalah adalah : **Bagaimanakah peran camat dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.**

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan camat dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, dalam kajian Administrasi Publik, khususnya tentang peran camat dalam mengawasi kinerja pegawai.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi pemerintah daerah khususnya camat dalam mengawasi kinerja pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan.

1.6. Kerangka Pemikiran



Peranan Camat dalam pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi dan realisasi kinerja pegawai. Pengawasan berperan mempengaruhi, dan memotivasi agar adanya peningkatan kualitas kinerja pegawai. Jika pengawasan dilakukan dengan baik, maka tujuan organisasi itu dapat tercapai dengan baik pula.

Secara garis besar kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi yang di tuangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi.